



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada Tanggal 12 agustus 2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
Semula	Rp.	2.084.617.655.104,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	203.365.268.511,35	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 2.287.982.923.615,35
2. Belanja Daerah			
Semula	Rp.	3.004.767.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	791.458.207.200,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan			Rp. 3.796.225.207.200,00 (-)
Surplus / (Defisit) setelah perubahan			(Rp. 1.508.242.283.584,65)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan Pembiayaan			
Semula	Rp.	920.149.344.896,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	688.092.938.688,65	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 1.608.242.283.584,65
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	100.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 100.000.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp. 1.508.242.283.584,65 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	200.000.000.000,00	
Bertambah / (berkurang)	Rp.	30.580.260.595,35	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 230.580.260.595,35

b. Dana Perimbangan			
Semula	Rp.	1.534.756.399.049,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	49.613.379.771,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 1.584.369.778.820,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
Semula	Rp.	349.861.256.055,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	123.171.628.145,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 473.032.884.200,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
Semula	Rp.	33.860.292.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	669.179.000,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 34.529.471.000,00

b. Retribusi Daerah			
Semula	Rp.	10.752.769.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(100.255.792,00)	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 10.652.513.208,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
Semula	Rp.	32.101.323.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(8.773.023.080,20)	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 23.328.299.919,80

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah			
Semula	Rp.	123.285.616.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	38.784.360.467,55	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 162.069.976.467,55

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak			
Semula	Rp.	1.077.675.581.049,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	47.688.679.771,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 1.125.364.260.820,00
b. Dana alokasi umum			
Semula	Rp.	450.655.808.000,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 450.655.808.000,00
c. Dana alokasi khusus			
Semula	Rp.	6.425.010.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	1.924.700.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 8.349.710.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah			
Semula	Rp.	0.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 0.00
b. Dana darurat			
Semula	Rp.	0.00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 0.00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya			
Semula	Rp.	190.628.081.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	83.358.207.200,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 273.986.288.200,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
Semula	Rp.	58.176.301.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(544.800.000,00)	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 57.631.501.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
Semula	Rp.	81.943.100.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	30.750.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 112.693.100.000,00
f. Dana Desa dan Desa Adat			
Semula	Rp.	19.113.774.055,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	9.608.220.945,00	
Jumlah setelah Perubahan			Rp. 28.721.995.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| Semula | Rp. | 930.727.552.459,00 | |
| Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 30.194.118.945,00 | |
| Jumlah setelah Perubahan | | | Rp. 960.921.671.404,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|--------------------------|
| Semula | Rp. | 2.074.039.447.541,00 | |
| Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 761.264.088.255,00 | |
| Jumlah setelah Perubahan | | | Rp. 2.835.303.535.796,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- | | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| Semula | Rp. | 650.448.064.104,00 | |
| Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 5.995.000.000,00 | |
| Jumlah setelah Perubahan | | | Rp. 656.443.064.104,00 |
- b. Belanja bunga
- | | | | |
|--------------------------|-----|------|----------|
| Semula | Rp. | 0,00 | |
| Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah setelah Perubahan | | | Rp. 0,00 |
- c. Belanja subsidi
- | | | | |
|-------------------------|-----|------|--|
| Semula | Rp. | 0,00 | |
| Bertambah / (Berkurang) | Rp. | 0,00 | |

Jumlah setelah Perubahan			Rp.	0.00
d. Belanja hibah				
Semula	Rp.	70.513.814.300,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	18.581.798.000,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	89.095.612.300,00
e. Belanja bantuan sosial				
Semula	Rp.	9.145.500.000,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(4.345.500.000,00)		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	4.800.000.000,00
f. Belanja bagi hasil				
Semula	Rp.	4.245.400.000,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	354.600.000,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	4.600.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan				
Semula	Rp.	191.374.774.055,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	9.608.220.945,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	200.982.995.000,00
h. Belanja tidak terduga				
Semula	Rp.	5.000.000.000,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	5.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:				
a. Belanja pegawai				
Semula	Rp.	181.381.322.100,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	36.697.873.500,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	218.079.195.600,00
b. Belanja barang dan jasa				
Semula	Rp.	786.283.943.244,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	170.498.228.042,80		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	956.782.171.286,80

c. Belanja modal		
Semula	Rp. 1.106.374.182.197,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 554.067.986.712,20	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 1.660.442.168.909,20

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
Semula	Rp. 920.149.344.896,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 688.092.938.688,65	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 1.608.242.283.584,65
b. Pengeluaran		
Semula	Rp. 00,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 100.000.000.000,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 100.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
Semula	Rp. 920.149.344.896,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 688.092.938.688,65	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 1.608.242.283.584,65
b. Pencairan dana cadangan		
Semula	Rp. 00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 00,00
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
Semula	Rp. 00,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 00,00

d. Penerimaan pinjaman daerah				
Semula	Rp.	00,00		
Bertambah/ Berkurang	Rp.	00,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	00,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
Semula	Rp.	00,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	00,00
f. Penerimaan piutang daerah				
Semula	Rp.	00,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	00,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan				
Semula	Rp.	00,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	00,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah				
Semula	Rp.	00,00		
Bertambah / (berkurang)	Rp.	100.000.000.000,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	100.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang				
Semula	Rp.	00,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	00,00
d. Pemberian pinjaman daerah				
Semula	Rp.	00,00		
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00		
Jumlah setelah Perubahan			Rp.	00,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah dan,
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kriterianya terdiri dari :
 - a. Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat yaitu penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman;
 - b. Penanggulangan wabah penyakit;
 - c. Penanggulangan bencana alam;
 - d. Penanggulangan bencana sosial;
 - e. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 14 September 2015



BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

DiUndangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 14 September 2015



SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIAT
DAERAH

03

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015: (7/2015)